

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA BARAT



UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
Bekerjasama dengan
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2009



SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Peternakan Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universitas Negeri Papua

Ketua : Ir. Jonly Woran, MP

Anggota : Iriani Sumpe, SPt, MP

Dr. Ir. Sintje Rumetor, MP

Dr. Ir. Irba U. Warsono, MP

KATA PENGANTAR

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pembangunan Peternakan Provinsi Papua Barat tahun 2009 ini merupakan MONEV kerjasama antara Universitas Negeri Papua (UNIPA) dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tahun ketiga setelah tahun 2007 dan 2008 lalu. Kegiatan monev tahun ketiga (2009) tetap dilaksanakan pada 8 (delapan) kabupaten, dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Manokwari, Sorong, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Kota Sorong.

Program/kegiatan MONEV Pembangunan Peternakan masih tetap terfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN/DAK, APBD/DAU, Otsus serta sumber dana yang lain. Aspek yang menjadi objek MONEV adalah 5 tujuan pembangunan peternakan, yaitu: bibit ternak, budidaya, keswan, kesmavet, dan pelayanan prima, 4 kegiatan utama peternakan, yaitu: tingkat pencapaian P2SDS, Restrukturisasi Perunggasan, Restrukturisasi Industri Persusuan, dan Penanggulangan Avian Influenza.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang mempercayakan Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk melaksanakan pekerjaan ini;
2. Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang Peternakan di kabupaten/kota yang telah menyiapkan data/informasi yang diperlukan;
3. Semua pihak yang membantu sehingga pelaksanaan monev dan penyusunan laporan ini dapat dirampungkan.

Laporan monev ini masih banyak kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaannya sangat kami harapkan. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembanguna peternakan Papua Barat ke depan.

Manokwari, November 2009

Dekan FPPK UNIPA,



[Handwritten Signature]
Murwanto, M.Si.

NIP. 195909171987031002

BAB VII

CAPAIAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAERAH DALAM Mendukung PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN PETERNAKAN

7.1. Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 (P2SDS)

Program swasembada daging sudah dilakukan sejak tahun 1995, dan sekarang ditargetkan tercapai tahun 2010 secara nasional. Sesungguhnya kalau kita cermati dengan benar program ini merupakan bagian dari globalisasi. Bagi negara maju diberikan kesempatan tahun 2010 untuk menyesuaikan kegiatan ekonominya, sedangkan negara berkembang termasuk Indonesia diberi waktu sampai dengan tahun 2020. Artinya, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan negara-negara tersebut tidak boleh lagi menerapkan hambatan perdagangan berupa tarif bea masuk (*free trade*). Sebelum waktu itu tiba, setiap negara masih diberikan kesempatan untuk memproteksi produk domestiknya. Dalam hal ini, produk hewan/peternakan, dengan tarif bea masuk yang rasional dan tidak boleh menerapkan kebijakan non tariff, kecuali yang dimungkinkan dalam perjanjian *sanitary and phytosanitary measures* (SPS), terutama berkaitan dengan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan serta produk pertanian/peternakan yang mengandung "hazard" seperti: residu obat, pestisida, cemaran mikroba berbahaya (AE, AI, Salmonela, dll).

Sejalan dengan program tersebut, dalam rangka percepatan program swasembada daging, maka pola pengembangan ternak sapi khusus di Provinsi Papua masih didominasi dan dimungkinkan dengan program "balinisasi". Strateginya adalah:

1. Menyebarkan dan meningkatkan populasi sapi bali secara menyeluruh dan merata di seluruh pelosok Provinsi Papua.
2. Pengendalian pematangan sapi betina produktif dan IB dengan menggunakan pejantan sapi bali unggul.

3. Swasembada daging dalam arti luas termasuk daging kambing, babi, ayam dan itik serta aneka ternak lainnya yang berkembang pesat di daerah.

Strategi lain adalah merubah pola pemeliharaan tradisional. Pola lama petani memelihara atau menerima paket sapi kontrak dari pemerintah sebanyak 2-3 ekor. Selama kurun waktu 5 tahun sapi yang dipelihara dan dikembangbiakan, sebagian diantaranya dikembalikan sebagai angsuran. Pada saat semua angsuran sudah dilunasi, maka sapi sisa ditangan petani dijual untuk menambah pendapatan keluarga (*subsisten*).

Pola baru yaitu modifikasi dari pola lama melalui agribisnis sapi potong dimana petani membentuk kelompok dan memperoleh bantuan dana berupa bantuan langsung masyarakat (BLM), bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM), pinjaman modal usaha kelompok (PMUK), dan lembaga mandiri mengakar pada masyarakat (LM3). Pengembangan agribisnis sapi potong ini didukung dengan dana bagi peruntukan penyiapan lahan, penanaman hijauan makanan ternak dan penyediaan air minum yang bersih melalui kegiatan pengelolaan lahan dan air (PLA) sebagai bagian dari sub sistem industri hulu, program aksi pembibitan (budidaya), dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil ternak (P2HT) sebagai bagian dari sub sistem industri hilir. Pengembangan agribisnis sapi potong ini bertujuan untuk:

1. Membangun kelompok usaha pembibit ternak yang berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan sebagai embrio terbentuknya *village breeding centre* (VBC) atau memperkuat yang sudah ada;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip pembibitan melalui pemberdayaan usaha kelompok pembibitan di pedesaan;
3. Membangun *image* pembibitan dan menginisiasi dimulainya pendekatan menjual "*brand*" bibit unggul.

Di Provinsi Papua Barat, program P2SDS berdasarkan hasil monev, capaian kinerjanya 52,97 % atau percepatan pencapaian swasembada daging sapi belum tercapai. Hal ini disebabkan karena program ini belum dilaksanakan

dengan baik, tetapi menjadi perencanaan ke depan program kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

7.1.1. Kontribusi Tujuh Langkah Terhadap Program P2SDS

Kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi (P2SDS), secara efektif dimulai tahun 2008, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010.

P2SDS dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal, artinya upaya swasembada tersebut akan lebih banyak menggerakkan secara optimal kemampuan produksi dan produktivitas ternak lokal. Selain itu juga, akan dioptimalkan segala potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi dan sumberdaya financial dalam negeri, serta pemberdayaan peternak rakyat. Swasembada ini sepenuhnya diupayakan untuk mengangkat pendapatan dan kesejahteraan peternakan rakyat. Untuk itu, upaya-upaya pemberdayaan lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya saing, promosi dan partisipasi masyarakat.

Operasional P2SDS meliputi tujuh langkah kegiatan, ditambah kegiatan pendukung. Tujuh langkah tersebut adalah :

1. Optimalisasi akseptor dan Kelahiran IB/KA diikuti pemendekan jarak kelahiran.
2. Mengembangkan RPH untuk pengendalian pemotongan betina produktif/bunting
3. Perbaikan mutu bibit dan penyediaan induk
4. Penanganan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan
5. Pengembangan pakan lokal
6. Intensifikasi kawin alam
7. Pengembangan SDM
8. Kelembagaan

Adapun kegiatan pendukung meliputi program aksi pembibitan, sarjana membangun desa (SMD), pemberdayaan LM3, sistem integrasi tanaman-ternak, pengembangan BATAMAS, pengembangan kawasan peternakan, pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

Di Provinsi Papua Barat, operasional P2SDS dengan tujuh langkah kegiatan, belum dilaksanakan. Alasan utama adalah Provinsi Papua Barat belum menjadi daerah/lokasi P2SDS. Meskipun demikian, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, tetap berkomitmen untuk mengangkat Provinsi Papua Barat menjadi salah satu Pusat Pembibitan Ternak untuk keberhasilan P2SDS.

7.1.2. Kontribusi SMD dan LM3 Terhadap Program P2SDS

SMD (Sarjana Membangun Desa) adalah suatu program yang ditujukan untuk menumbuhkan usaha-usaha peternakan yang dikelola secara profesional, sehingga dapat menarik investasi public dan perbankan. Program ini dimaksudkan untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi peternakan dan kesehatan hewan untuk dapat berkiprah secara langsung di tengah masyarakat dalam proses introduksi, distribusi dan transfer inovasi-inovasi baru kepada peternak.

Di Provinsi Papua Barat, kontribusi SMD terhadap program P2SDS berdasarkan hasil monev, capaian kinerjanya sangat kurang (0,00 %). Hal ini disebabkan karena program ini belum dilaksanakan, tetapi telah direncanakan untuk menjadi program kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agen pembangunan peternakan di pedesaan, karena pada umumnya mempunyai keunggulan-keunggulan, antara lain sumberdaya lahan pertanian yang cukup luas sebagai modal untuk mengembangkan usaha peternakan; mempunyai sumberdaya kepemimpinan yang unggul terutama tokoh agama yang kharismatik dan merupakan panutan bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya.

Di Provinsi Papua Barat, kontribusi LM3 terhadap program P2SDS berdasarkan hasil monev, capaian kinerjanya sangat kurang (1,00 %). Hal ini disebabkan karena program ini belum dilaksanakan dengan baik, tetapi menjadi perencanaan ke depan program kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

7.2. Restrukturisasi Perunggasan (RP)

Kebijakan restrukturisasi perunggasan mencakup penataan sektor perunggasan mulai dari sektor 1 (industri yang terintegrasi dan pembibitan), sektor 2 (budidaya unggas dengan pola inti-plasma), sektor 3 (peternak mandiri dan kelompok ternak, dan sektor 4 (masyarakat yang memelihara hanya beberapa ekor ayam buras dan itik di belakang rumah). Selain keempat sektor tersebut, masyarakat yang memelihara unggas untuk tujuan hobi (kesayangan), penelitian, pendidikan dan hiburan (kebun binatang) perlu diatur sehingga memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pewilayahan (*zoning*) merupakan penempatan usaha peternakan dalam suatu kawasan tertentu yang sesuai dengan peruntukan bagi kegiatan peternakan. Dalam suatu kawasan hanya terdapat satu jenis ternak dan dilarang untuk memelihara ayam berdekatan dengan itik, dan usaha budidaya unggas tidak boleh berdekatan dengan usaha pembibitan unggas. Penempatan suatu jenis ternak dalam suatu wilayah akan memudahkan pelayanan, pengawasan, serta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak.

Selain pewilayahan yang merupakan langkah strategis dalam kebijakan restrukturisasi perunggasan, langkah strategis lainnya adalah pengamanan rantai pasok mulai dari lokasi peternakan sampai dengan produk berada di konsumen akhir. Dengan kata lain, dilakukan pengamanan yang cermat terhadap unggas hidup dan produknya mulai dari lokasi peternakan sampai dengan siap dikonsumsi di meja makan (*from farm to table*).

Inti penataan ini yaitu pengaturan industri perunggasan menjadi struktur hulu, budidaya, hilir, dan jasa pendukung. Struktur hulu terdiri dari bibit, pakan, vaksin, dan bahan biologik. Struktur budidaya terdiri atas kawasan

produksi dan kawasan non produksi. Struktur hilir terdiri dari distribusi ternak dan produknya, tempat penampungan, pasar unggas serta rumah pemotongan unggas. Sedangkan struktur penunjang antara lain kelembagaan seperti penyediaan permodalan, kelembagaan peternakan dan veteriner.

Di Provinsi Papua Barat, capaian kinerja restrukturisasi perunggasan di tahun 2008 adalah baik (65,83 %). Dibandingkan tahun 2007, capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan.

7.3. Restrukturisasi Persusuan (RPS)

Restrukturisasi persusuan (RPS) tidak berbeda dengan restrukturisasi perunggasan (RP), yaitu bagaimana menyediakan produk pangan asal ternak berupa daging/telur yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Agar kualitas susu segar sesuai standar mutu atau *Standar Nasional Indonesia* (SNI), maka diperlukan pedoman *good hygiene practices* (GHP) pada mata rantai produksi susu segar mulai dari peternakan sapi perah sampai pada industri pengolahan susu segar (IPS).

Dalam rangka meningkatkan kualitas susu segar dalam negeri melalui pembinaan penerapan hygiene sanitasi pada rantai produksi susu, maka diperlukan pedoman GHP. GHP tersebut diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri pertanian. Dengan demikian diharapkan mutu susu segar yang dihasilkan akan sesuai dengan SNI susu segar.

Pedoman ini mengatur tentang prosedur GPH di peternakan sapi perah, GPH di tempat penampungan susu, pengawasan penerapan GPH, serta sistem pencatatan dan pengawasan penerapan GPH. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi demi terciptanya kondisi usaha susu segar yang berkualitas, upaya penerapan *good manufacturing practices* (GMP) dilakukan di berbagai daerah yang mengelola peternakan yang menghasilkan susu segar. Pembinaan dilakukan mulai dari tingkat peternak sampai ke tempat pengolahan susu (TPS/koperasi).

Di Provinsi Papua Barat, capaian kinerja restrukturisasi persusuan di tahun 2008 adalah sangat kurang (0,00 %). Hasil ini masih sama dengan capaian kinerja tahun 2007.

7.4. Pengendalian Avian Influenza (AI)

Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman *Village Poultry Farming* (VPF), terdapat persyaratan pemeliharaan unggas di pemukiman untuk mencegah terjadinya penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI) di pemukiman. Pemeliharaan unggas di pemukiman mempunyai resiko yang cukup tinggi terhadap penularan AI kepada manusia, karena media yang dipergunakan baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki potensi penularan virus AI yang sangat berbahaya. Peraturan Menteri Pertanian ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Flu Burung (AI).

Petunjuk praktis dalam mengelola peternakan unggas tertuang dalam *Good Farming Practice* (GFP) Ayam Buras, *Good Farming Practice* (GFP) Itik Pedaging, dan *Good Farming Practice* (GFP) Itik Petelur. Dengan adanya petunjuk praktis ini, diharapkan pihak pengelola peternakan unggas akan mengelolanya secara profesional dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bahkan membahayakan.

Di Provinsi Papua Barat, capaian kinerja program penanggulangan AI di tahun 2008 dan proyeksi di tahun 2009 adalah baik (61,08 %). Dibandingkan tahun 2007, capaian kinerja program ini mengalami peningkatan.

BAB VIII

PERSEPSI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN NASIONAL

Dalam perencanaan pembangunan ada dua pendekatan yang selama ini digunakan. Pendekatan pertama adalah merumuskan perencanaan yang dikenal dengan rencana dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan sebaliknya dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Pendekatan kedua adalah berdasarkan skala prioritas. Merumuskan skala prioritas ini sering terbentur pada paduan yang kurang pas. Penyebabnya tentu sangat dimensional, termasuk system perencanaan yang tidak didasarkan pada pertimbangan akan kebutuhan masyarakat (*needs*), namun lebih memprioritaskan pada keinginan pengambil kebijakan (*wants*).

Berkaitan dengan itu, pihak Direktorat Jenderal peternakan Departemen Pertanian RI dalam setiap kegiatan monev, berkeinginan mendapatkan umpan balik dari pihak daerah (Dinas Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri di daerah, dan Praktisi di bidang peternakan), dengan memberikan pandangan (persepsi) sejauhmana kebijakan pembangunan peternakan yang dirumuskan secara nasional benar-benar mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan daerah.

Persepsi atau pandangan pihak daerah terhadap kebijakan pembangunan peternakan nasional, disajikan dalam Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Persepsi Pihak Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Peternakan Nasional

Aspek	Nilai	Kesimpulan	Faktor Penyebab			
			Koordinasi	Peraturan	Kewenangan	Konsistensi
Kebijakan	5,61	Puas	1,66	2,71	2,31	3,31
Program dan Kegiatan	6,04	Puas	1,76	2,56	2,38	3,30
Target dan Sasaran	4,50	Tidak Puas	1,70	2,70	2,25	3,20
Kewenangan	5,20	Puas	2,20	1,97	2,30	3,53
Pendanaan	4,23	Tidak Puas	2,17	2,57	1,97	3,33
Kelembagaan	4,85	Tidak Puas	1,56	2,53	2,44	3,47
Pelayanan Prima	4,53	Tidak Puas	1,98	1,75	2,85	3,42

Tabel 30 memperlihatkan bahwa dari tujuh aspek yang diberikan tanggapan, tiga aspek mendapat tanggapan puas dan empat aspek lainnya mendapat tanggapan tidak puas. Ketiga aspek yang mendapat tanggapan puas adalah: kebijakan, program dan kewenangan, sedangkan empat aspek yang mendapat tanggapan tidak puas adalah :

1. Target dan Sasaran

Pada aspek ini, faktor penyebab utama adalah koordinasi yang tidak berjalan baik, sehingga program dan kegiatan salah target dan sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita dan skala prioritas daerah. Faktor penyebab berikutnya adalah kewenangan dan peraturan yang umumnya membatasi untuk dapat mencapai target dan sasaran. Faktor penyebab lainnya adalah konsistensi, yaitu sering berubahnya kebijakan, peraturan, program dan kegiatan yang membingungkan daerah.

2. Pendanaan

Pada aspek ini, faktor penyebab utama adalah kewenangan yang sering membatasi daerah dalam hal perencanaan dan penggunaan dana. Faktor penyebab berikutnya adalah koordinasi dan peraturan yang kurang jelas dan berubah-ubah serta kurang sosialisasi. Faktor penyebab lainnya adalah konsistensi, yaitu sering berubahnya kebijakan, peraturan, program dan kegiatan yang membingungkan daerah.

3. Kelembagaan

Pada aspek ini, faktor penyebab utama adalah koordinasi yang tidak berjalan baik, sehingga program dan kegiatan tidak berjalan baik. Faktor penyebab berikutnya adalah kewenangan dan peraturan yang umumnya membatasi daerah. Faktor penyebab lainnya adalah konsistensi, yaitu sering berubahnya kebijakan, peraturan, program dan kegiatan yang membingungkan daerah.

4. Pelayanan prima

Pada aspek ini faktor penyebab utama adalah peraturan yang sering berubah-ubah sehingga membingungkan daerah. Faktor penyebab utama lainnya adalah koordinasi, kewenangan dan konsistensi.

BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi pembangunan peternakan di Papua Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan 5 (Lima) tujuan pokok, masing-masing :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak baik tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai sangat baik, dengan capaian kinerja masing-masing 80,98 % dan 80,76 %.
 - b. Pengembangan budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi ternak baik tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai cukup, dengan capaian kinerja masing-masing 56,63 % dan 58,84 %.
 - c. Peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan tahun 2008 dinilai cukup, dengan capaian kinerja 48,40 %, sedangkan tahun 2009 dinilai kurang, dengan capaian kinerja 39,88 %.
 - d. Peningkatan jaminan keamanan pangan yang ASUH tahun 2008 dinilai sangat kurang, dengan capaian kinerja 19,52 %, sedangkan tahun 2009 dinilai kurang, dengan capaian kinerja 25,95 %.
 - e. Peningkatan pelayanan prima pada masyarakat baik tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai cukup, dengan capaian kinerja masing-masing 47,01 %, dan 41,59 %.

Secara keseluruhan hasil evaluasi pembangunan peternakan tahun 2008 dinilai kurang dengan capaian kinerja 27,63, artinya semua sumberdaya dan potensi peternakan yang digunakan untuk membangun peternakan di Papua Barat berdasarkan parameter evaluasi masih kurang. Demikian halnya monitoring pembangunan peternakan tahun 2009, hasilnya masih kurang, dengan capaian kinerja 27,08, artinya belum semua sumberdaya dan potensi peternakan digunakan karena monitoring

ini berlaku sampai dengan bulan Juni 2009. Capaian kinerja ini diharapkan akan meningkat sampai dengan akhir tahun 2009.

2. Berdasarkan kegiatan utama peternakan, masing-masing :
 - a. Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) untuk tahun 2008 maupun tahun 2009 belum tercapai, dengan capaian kinerja masing-masing 56,63 % dan 49,31 %. Artinya, sampai saat ini Papua Barat belum mencapai swasembada daging sapi, karena masih memfokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas bibit serta populasi ternak.
 - b. Restrukturisasi Perunggasan (RP) tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai baik, dengan capaian kinerja masing-masing 66,12 % dan 65,54 %.
 - c. Restrukturisasi Persusuan (RPS) tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai sangat kurang, dengan capaian kinerja masing-masing 0,00 %.
 - d. Penanggulangan Avian Influenza (AI) baik tahun 2008 maupun tahun 2009 dinilai baik, dengan capaian kinerja masing-masing 66,74 %, dan 55,42 %.
3. Persepsi daerah terhadap kebijakan pusat disimpulkan, dinilai dari 7 (Tujuh) aspek utama yaitu : kebijakan dengan nilai 5,61 (puas), program dan kegiatan dengan nilai 6,04 (puas), target dan sasaran dengan nilai 4,50 (tidak puas), kewenangan dengan nilai 5,20 (puas), pendanaan dengan nilai 4,23 (tidak puas), kelembagaan dengan nilai 4,85 (tidak puas) dan pelayanan prima dengan nilai 4,53 (tidak puas). Artinya, nilai setiap variable dan justifikasi yang diperoleh hendaknya menjadi potret bagi pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan peternakan di daerah pada tahun yang akan datang.

9.2. Rekomendasi

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi, beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah :

1. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas bibit ternak, serta budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi ternak perlu dipertimbangkan :
 - a. Peningkatan mutu genetik sapi (*regenerasi*) melalui pembangunan pusat pembibitan sapi (*breeding centre*) dengan memanfaatkan teknologi kawin suntik (*inseminasi buatan*). Pelaksanaannya di Kabupaten Sorong, Manokwari dan Fakfak.
 - b. Pembangunan kawasan sentra produksi sapi bibit dengan sistem *ranch* skala besar di Bomberai Fakfak dan pembukaan *mini ranch* di dataran Isim dan Momi Waren serta taman ternak di Lembah Kebar Kabupaten Manokwari.
 - c. Pengembangan program penggemukkan sapi (*fattening*) di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Manokwari. Ketiga kabupaten ini memiliki persediaan pakan mulai dari hijauan segar sampai limbah pertanian, yang cukup baik dari segi kuantitas dan kualitas.
2. Pembangunan dan penyediaan RPH/TPA yang dilengkapi dengan sarana penunjang, baik peralatan maupun petugas professional dalam menangani produk ternak sesuai standar mutu.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal :
 - a. Meningkatkan kualitas tenaga teknis melalui kursus, magang dan pelatihan teknis lainnya.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur terhadap masyarakat peternakan.
4. Melalui rapat koordinasi antara pusat dan daerah, aspirasi pembangunan di daerah dapat diakomodir, sehingga apa yang dibutuhkan daerah benar-benar menyentuh pada kebutuhan dasar.

5. Alokasi dana yang bersumber dari APBN/DAK, hendaknya ditingkatkan persentasenya, sehingga mampu mempercepat pembangunan peternakan di Papua Barat ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Ajar Pengantar Ilmu Peternakan. Tim Pengajar Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Papua, Tahun 2003.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Tahun 2009.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Tahun 2008.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pemerintah Kabupaten Manokwari, Tahun 2009.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pemerintah Kabupaten Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Peternakan, Tahun 2008.
- Laporan "Kegiatan Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak" dan "Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak". Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Program Peningkatan Ketahanan Pangan "Kegiatan Pemberantasan AI/Public Awareness dan Pemantauan Perkembangan AI dan "Kegiatan Rose Bengal Test". Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun Anggaran 2008. Satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat (330045) Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Kode Satker 018.06.330047 "Semester I Tahun Anggaran 2008". Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Manokwari, Tahun 2008
- Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Kode Satker (330045)"Semester II Tahun Anggaran 2008". Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Kode Satker 018.06.330047 "Semester I Tahun Anggaran 2008". Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kota Sorong Dinas Pertanian dan Peternakan, Tahun 2008.

- Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, Tahun 2006.
- Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, Tahun 2008.
- Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Sorong, Tahun 2008.
- Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kotamadya Sorong. Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sorong Selatan, Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Raja Ampat, Tahun 2008.
- Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kaimana, Tahun 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kabupaten Sorong Dinas Peternakan, Tahun 2008.
- Laporan Akhir "Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Sorong". Dinas Peternakan Kabupaten Sorong, Tahun 2008.
- Papua Barat Dalam Angka, 2008. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Tahun 2008.
- Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Program-Kegiatan Pembangunan Peternakan Tahun 2008. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Tahun 2008.
- Pedoman Umum Restrukturisasi Perunggasan Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Unggas Di Pedesaan (*Village Poultry Farming*). Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia, Tahun 2008.
- Pedoman Umum Restrukturisasi Perunggasan Melalui Penataan Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman. Direktorat Jenderal
- Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Peternakan Tahun 2008. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. Jakarta 2008.
- Profil Kelompok Ternak Unggas. Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia, Tahun 2008.

- Restrukturisasi Perunggasan.** Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Tahun 2008.
- Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPAK) T.A. 2008.** Dinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat, Tahun 2008.
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).** Satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat (018.06.330047) Manokwari, Tahun 2008.
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).** Satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat (018.06.330045) Manokwari, Tahun 2008.
- Statistik Peternakan 2008 "Statistical on Livestock 2008".** Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI, Tahun 2008.
- Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2008 Provinsi Papua Barat "Uraian Kegiatan dan Analisis Hasil".** Kerjasama BPS Provinsi Papua Barat dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Tahun 2008.
- Training of Trainers Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Peternakan Tahun 2008.** Kerjasama Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Tahun 2008.